

***IMPEACHMENT TERHADAP KEPALA DAERAH  
DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA  
MENURUT FIQIH SIYASAH***  
(Studi Pada Pasal 78 (1) Poin c UU No 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintah Daerah)



**Skripsi**  
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
dalam Ilmu Syaria'h

Oleh:  
**APRIANSYAH**  
NPM:1321020047  
Program Studi : Siyasah

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H/ 2018 M**

***IMPEACHMENT TERHADAP KEPALA DAERAH  
DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA  
MENURUT FIQIH SIYASAH***  
(Studi Pada Pasal 78 (1) Poin c UU No 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintah Daerah)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
dalam ilmu Syari'ah**

**Oleh:**



**Pembimbing I : Drs. Maimun, S.H., M.A**  
**Pembimbing II : Frenki, S. E.I., M.Si**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H/ 2018 M**

## ABSTRAK

Di era Demokrasi sekarang ini banyak Kepala Daerah atau pejabat negara di makzulkan dari jabatannya, di karenakan Kepala Daerah tersebut terkena kasus korupsi, Pemakzulan dalam Islam dapat di disinonimkan dengan *al-khalla'* yang berarti mencopot, mencabut, memecat, menelanjangi, menyingkirkan. Ibnu Majhur mengatakan pencopotan sama artinya dengan mencabutnya hanya saja di dalam istilah pemecatan terkandung makna penangguhan atau proses secara perlahan. Istilah *al-khalla'* ini erat kaitanya dengan pelanggaran. Jadi dapat di simpulkan bahwa *al-khalla'* dapat disinonimkan dengan pemecatan atau pemakzulan, namun dalam Ketatanegaraan Indonesia lebih di kenal dengan sebutan pemberhentian.

adapun metode dalam penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) Sifat penelitian ini termasuk penelitian hukum *deskriptif analitic* yang mengkaji peraturan politik, hukum yang berlaku di indonesia dan kaidah-kaidah Islam yang terdapat dalam Al-qur'an dan hadis mengenai impechment kepala daerah.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep impeachment Kepala Daerah dalam ketatanegaraan Indoneisa dan untuk mngetahui tinjauan fiqh Siyasah terhadap impeachment kepala daerah dalam ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah impeachment Kepala Daerah dalam ketatanegaraan di Indonesia ? dan bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah terhadap impeachment Kepala Daerah dalam ketatanegaraan Indonesia ?.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan: Pertama Impeachment Kepala Daerah di Indonesia yaitu pada UU No 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 78 ayat (1), Kedua Pada masa nabi gagasan pemberhentian atau pemakzulan Kepala Daerah belum

muncul dan belum di jelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadist nabi yang ada hanya emberio saja dalam masa khalifah yang terjadi karena hilangnya kepercayaan rakyat terhadap Imam.





**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531, 780421*

**PERSETUJUAN**

**Nama** : Apriansyah  
**NPM** : 1321020047  
**Jurusan** : Siyasah  
**Fakultas** : Syari'ah  
**Judul** : **IMPEACHMENT TERHADAP KEPALA DAERAH DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi Pada Pasal 78 (1) Poin c UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. Maimun, S.H., M.A.**  
**NIP.196003291987031003**

**Pembimbing II**

**FRENKI, S.E.I., M.Si.**  
**NIP.198003152009011017**

**Ketua Jurusan Jinayah Siyasah**

**Drs. Susiadi AS., M.Sos. I**  
**NIP.19580817193031002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**


*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,780421*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **IMPEACHMENT TERHADAP KEPALA DAERAH DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT FIQIH SIYASAH** (Studi Pada Pasal 78 (1) Poin c UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah) disusun oleh Apriansyah NPM 1321020047 Program Studi Siyasah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal: Rabu / 14 Februari 2018.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Jayusman, M. Ag.**

  
(.....)

**Sekretaris : Muhammad Irfan., S. H. I., M.Sy.**

  
(.....)

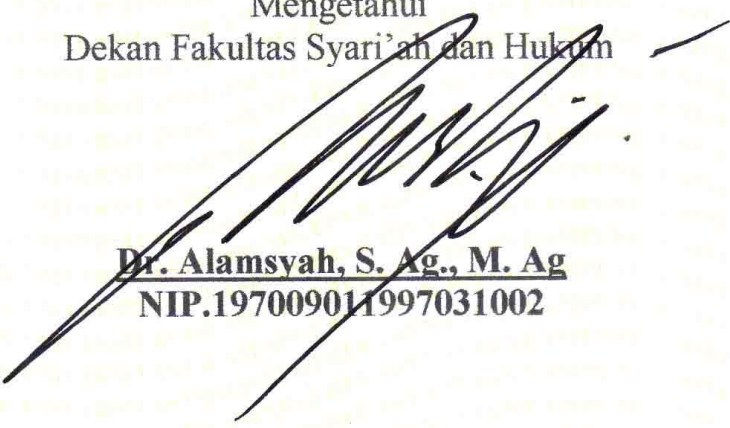
**Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M. H.**

  
(.....)

**Penguji II : Drs. Maimun. S.H., M.A.**

  
(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

  
**Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag**  
**NIP.197009011997031002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. An-nisa. 59)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda, cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku ayahanda Idham Kholid dan Ibunda Apendawati yang telah tulus dan sabar membesarkan, membiayai serta mendo'akan setiap saat selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung tanpa pernah meminta balas jasanya, semoga Allah SWT mengabulkan semua do'a kalian memuliakan kalian di dunia dan akhirat.
2. Adik kandungku Dora Halisa yang telah memberikan motivasi dan memberikan dukungan, sehingga dapat menyelesaikan studi di fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dan tak lupa Bibik Ning, Ajong Rohimin, Ayah Sairun Ismail , Ibuk Asnayati , keponakan-keponakan dan sepupu Marina Riski, Rohil, Sely dan esta serta semua keluarga dari Muaradua Okus Selatan dan Bandar Lampung yang selalu menginspirasi saya untuk semangat maju terus.
3. Almamaterku tercinta Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Apriansyah tapi lebih familiar dikalangan teman atau pun keluarga yaitu Pery, di lahirkan pada tanggal 06 Febuari 1996 di Desa Negeri Agung, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Muaradua-Sumatra Selatan. Penulis adalah putra ke-1 dari 2 bersaudara, buah perkawinan pasangan bapak Idham Kholid dan Ibu Apendawati dengan riwayat sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Negeri Agung, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Kemering Ulu selatan pada tahun 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Kemering Ulu selatan pada tahun 2009-2011.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Kemering Ulu selatan pada tahun 2011-2013.
4. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dengan program Studi Siyasa.

Selama menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung penulis pernah aktif di berbagai organisasi baik intra maupun ekstra kampus diantara nya sebagai berikut:

1. Organisasi Intra Kampus  
Penulis pernah menjadi Anggota Ukm Bahasa dan Pengurus Ukm Takewondo.
2. Organisasi Ekstra Kampus  
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Departemen Kajian Keilmuan 2014-2015, Kabid PPPA Komisariat Syari'ah tahun 2015-2016, Departemen diklat BPL HMI Cabang Bandar Lampung, Fasilitator Kawan Tani 2014- sekarang , pengurus socia cendekia 2016 - sekarang, Anggota komunitas kesadaran kesehatan, jamaah paguyuban Al Furqon, Wakil Meranai Ikatan Pemuda Pemudi Muaradua (IPAMU) Tahun 2017-

2019, Anggota Gerakan Pesona Oku Selatan (GENPI OKUS), penanggung jawab Himpunan Mahasiswa Syari'ah Indoensia (HIMSI), pendiri sekaligus penanggung jawab Keluarga Besar Mahasiswa Ogan Komering Ulu Selatan UIN Raden Intan Lampung (KBM- OKUS) dan Kabid Humas LSM PENJARA (Lembaga Swadaya Masyarakat pemantau kinerja aparatur negara).



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **IMPEACHMENT TERHADAP KEPALA DAERAH DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT FIQIH SIYASAH**. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, sahabat, dan umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata satu (SI) Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Hukum (SH).

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karna itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Drs. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulis hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Frenki, S. E.I., M.Si., selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada segenap keluarga besar civitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Petugas perpustakaan Fakultas syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
6. Reka-rekan seperjuangan Bagus setiawan, Muhamad Irfan Dzaki, Memet Juliansah, Zara Risqia, Dinar Ambarsari, Vivi Ermasela, bang Septian, bang adul, bang Romi,tum ijan, bang rudi, bang imam kawan-kawan KKN 141 Rantau Tijing,

Furqon, Dzaki, Meri, Sodik, Hiyang, Febrina dan yang lainnya serta adinda-adinda, Aris sutiono, syaidani simanjuntak, ari, mifta, ririn, heri, samenetim, Adek asuh selalu mensupport adinda fitria wulandari, dewi dan fitri dan kader HMI yang tercinta, seluruh keluarga besar IPAMU-IKAM Muaradua, alva, Tina, Yanti, Putra, Salman, Nendi, devi, sari dan Seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Oku Selatan (KBM OKUS).

7. Rekan-rekan Mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini khususnya teman-temanku yang selalu sering sejalan tanpa kenal lelah untuk membantu generasi muda yang mampu menjadi kebanggaan keluarga dan Almamater UIN Raden Intan Lampung.
8. Sahabat-sahabatku tercinta prodi Siyasah (SI) A 2013 yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang di berikan kepada penulis, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ini masih banyak kekurangan. Untuk di kritik dan saran yang sifatnya membangun semangat harapan penulis. Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan nya amin.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG**

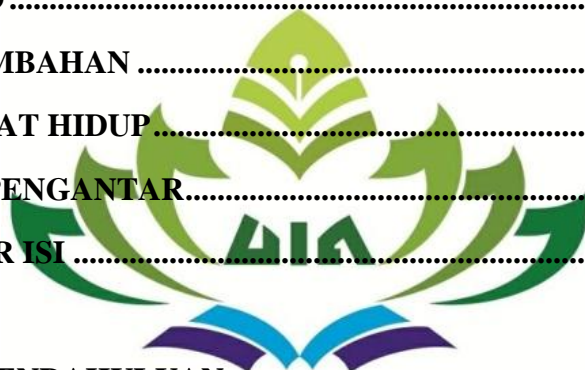
Bandar Lampung, 14 Febuari 2018 M

Penyusun,

**APRIANSYAH**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUTUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	
PERSEMBAHAN .....	
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI .....	



### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul .....	1
B. Alasan memilih judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian.....	

### BAB II *IMPEACHMENT* KEPALA DAERAH

#### MENURUT FIQH SIYASAH

A. Istilah Impeachment dalam Fiqh Siyasah .....	
B. Sejarah Impeachment Pemimpin dalam Islam ..	
C. Dasar Hukum Impeachment dalam Islam.....	
D. Mekanisme Impeachment Pemimpin dalam	



Islam .....

### **BAB III *IMPEACHMENT* KEPALA DAERAH**

#### **MENURUT KETATANEGARAAN**

#### **INDONESIA**

- A. Pengertian Impeachment ..... 27
- B. Sejarah Impeachment Kepala Daerah  
di Indonesia .....
- C. Dasar Hukum Impeachment di Indonesia .....
- D. Mekanisme Impeachment Kepala Daerah  
di Indonesia .....



**BAB IV *IMPEACHMENT* KEPALA DAERAH DI  
INDONESIA MENURUT FIQH SIYASAH**

- A. Impeachment Kepala Daerah dalam  
Ketatanegaraan Indonesia .....
- B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Impeachment  
Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan  
Indonesia .....

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....
- B. Saran.....

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan di jelaskan dari istilah-istilah yang terkandung dalam skripsi ini. Judul skripsi adalah. **“Impeachment terhadap Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia Menurut Fiqh Siyasah”**. Adapun istilah- istilah yang terdapat dalam judul skripsi tersebut yaitu sebagai berikut :

*Impeachment* adalah pengawasan legislatif yang luar biasa (*an extra ordinary legislative check*) terhadap eksekutif dan merupakan tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatan dan kemungkinan larangan untuk memegang suatu jabatan, bukan hukuman pidana atau pengenaan sanksi ganti rugi.<sup>1</sup>

Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, untuk Daerah kota disebut Wali kota.<sup>2</sup>

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur tata organisasi negara, jika yang diatur adalah organisasi negara maka hukum yang mengaturnya.<sup>3</sup>

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>4</sup>

Fiqh siyasah dusturiyah adalah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan

---

<sup>1</sup>Zoelva Hamdan, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.

9.

<sup>2</sup>UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 59 ayat (2)

<sup>3</sup>Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Admistrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 12.

<sup>4</sup>Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group2014), h. 4.

warga negara dan lembaga negara lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa maksud dari judul skripsi adalah penjelasan tentang konsep Impeachment terhadap kepala negara di Indonesia dan kemudian di analisis menurut prespektif Fiqh Siyasah.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan objektif
  - a. Banyaknya kasus impeachmnet yang terjadi terhadap Kepala Daerah di Indonesia hal ini yang berimplikasi pada eksistensi pihak legislatif terhadap eksekutif.
  - b. Banyak ditemukan kasus impeachment yang terjadi terhadap Kepala Daerah di Indonesia yang diduga tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
2. Alasan subjektif
  - a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).
  - b. Tersedianya literatur yang menunjang sebagai refrensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali perubahan Undang-Undang dasar (UUD) 1945 adalah adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di sebut secara limitatif dalam konsitusi yaitu penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, ketentuan

tersebut di atur dalam pasal 7A dan 7b perubahan ketiga UUD 1945.<sup>5</sup>

Istilah pemakzulan relatif baru di kenal di Indonesia setelah perubahan kedua Undang-Undang dasar 1945 sebagai padanan istilah pemecatan atau pemberhentian seorang dari jabatannya. Pemakzulan (*Impeachment*) adalah proses pemecatan, penyinggiran atau penurunan seorang Presiden atau pejabat Negara dari tahta atau jabatannya karena melakukan pelanggaran Hukum maupun karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat Negara.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan pemerintah daerah di suatu negara tergantung dari bentuk negara yang dianut oleh negara bersangkutan, bentuk negara menggambarkan pembagian kekuasaan didalam suatu negara secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal menggambarkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>7</sup>

Di era Demokrasi sekarang ini banyak Kepala Daerah atau pejabat negara di makzulkan dari jabatannya, di karenakan Kepala Daerah tersebut terkena kasus korupsi, melanggar larangan Kepala Daerah yang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, UU ini menentukan substansi pemberhentian Kepala Daerah.<sup>8</sup>

Berangkat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang

---

<sup>5</sup>Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002), h. 42-43 dan 61-62.

<sup>6</sup>Zoelva Hamdan, *Op. Cit.*, h. 12-13.

<sup>7</sup>Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI* ( Jakarta : Radar Jaya Pratama , 1999 ), h. 23.

<sup>8</sup>Amademen Undang-Undang Pemda (UU RI No.9 tahun 2015) (Jakarta:Sinar Grafika,2016), h. vii.



Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, dan 89.<sup>9</sup>

Pemakzulan dalam Islam dapat disinonimkan dengan *al-khalla'* yang berarti mencopot, mencabut, memecat, menelanjangi, menyingkirkan. Ibnu Majhur mengatakan pencopotan sama artinya dengan mencabutnya hanya saja di dalam istilah pemecatan terkandung makna penangguhan atau proses secara perlahan. Istilah *al-khalla'* ini erat kaitanya dengan pelanggaran. Jadi dapat di simpulkan bahwa *al-khalla'* dapat disinonimkan dengan pemecatan atau pemakzulan, namun dalam Ketatanegaraan Indonesia lebih di kenal dengan sebutan pemberhentian<sup>10</sup>

Dalam Islam perkara pertama dan faktor yang mewajibkan seorang pemimpin dimazulkan dari kekuasaan untuk mengatur segala persoalan kaum muslimin adalah murtad dan kafir setelah iman. Ketika imam melakukan kejahatan (dosa) besar yang menyebabkan kekafiran dan murtad dari Islam. Kejahatan seperti ini membuatnya terlepas dari kekuasaan mengatur persoalan kaum muslim.<sup>11</sup>

Allah berfirman:

وَأِنْ مَّعَكُمْ نَكْرٌ أَلَمْ يَقُلُوا اللَّهُمَّ إِنَّا فَتَقْنَاكُمْ فَأَنْصِبْ لِكُلِّ فِتْنَةٍ كِتَابًا ۚ وَنَعْلَمُ خُصْمَ الَّذِينَ يَرْتَضُونَ ۚ  
مُؤْمِنِينَ مِّنْ وَنَمْنَعُكُمْ عَلَيْكُمْ قَوْلًا وَنُصِيبُ لِّلْكَافِرِينَ ۚ  
نَعْلَى لِّلْكَافِرِينَ ۚ اللَّهُ يُجْعَلُ وَلِنَ الْقِيَمَةِ يَوْمَ بَيْنَكُمْ وَتَحْكُمُ ۚ فَاللَّهُ السَّيْلُ



---

<sup>9</sup>Ibid. h. 99-110.

<sup>10</sup>Ismail Yahya, *Hubungan Rakyat dan Penguasa Prespektif Sunnah* (Jakarta: Gema Insan press,1995), h. 191-193.

<sup>11</sup>Ad-Dumaiji Abdullah, *Imamah 'UzhmaKonsep Kepemimpinan dalam Islam* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 529.

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Impeachment Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam, dan dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul "Impeachment terhadap Kepala Daerah dalam ketatanegaraan Indonesia menurut Fiqh Siyasah "

#### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian singkat di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah impeachment Kepala Daerah dalam ketatanegaraan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah terhadap impeachment Kepala Daerah dalam ketatanegaraan Indonesia ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis impeachment Kepala Daerah dalam ketatanegaraan di Indonesia
- b. Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap impeachment Kepala Daerah dalam ketatanegaraan Indonesia

## **F. Metode Penelitian**

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan, maka yang perlu diuraikan beberapa hal di bawah ini :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseacrch*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan masyarakat yang di bahas.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah impeachment, Kepala Daerah, hukum tata Negara, fiqh siyasah, dan menetapkan dan memahami hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Atapun disebut dengan penelitian *deskriptif analitis*. Dilihat dari sisi politik dan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>13</sup> Dalam hal ini, penelitian ditelaah dengan mengkaji perpolitikan indonesia tentang impeachment kepala daerah dengan melihat kajian dalam fiqh siyasah.

### **2. Data dan Sumber Data**

sumber data yang di perlukan dalam penulisan ini dapat di bedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Bahan Hukum primer yaitu data yang digunakan yang berkaitan dengan tema Skripsi, sumber data primer yang digunakan adalah Al qur'An, hadits, buku kajian tentang Kepala daerah, kositusi, kita-kitab Fiqh Siyasah dan UU NO 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Bahan Hukum sekunder yakni sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan tema Skripsi ini. Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa koran, jurnal, karya ilmiah, majalah, buletin, internet dan artikel.

---

<sup>12</sup>Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Taruna Grafika Bandung, 2000), h. 38.

<sup>13</sup>Sorjono soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (PT. Rajawali Press, Jakarta, 1985), h. 15.

- c. Bahan hukum tersier yakni data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yakni berupa kamus ilmiah, ensilopedia dan lainnya.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik data yang di gunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan ini penulis menggunakan penelitian dokumentasi, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber data tertulis, yaitu: buku-buku hukum tata negara, buku-buku fiqh siyasah, artikel, makalah seminar, dan tulisan lain yang dapat dijadikan refrensi dalam penelitian ini.

### 4. Teknik pengolahan data

Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat di lakukan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik bersumber dari Al qur'an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang sesuai dengan yang diteliti
- c. *Rekontruksi* data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah di pahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir menarik kesimpulan.<sup>15</sup>

### 5. Metode analisis data

Adapun metode analisi data yang penulis gunakan adalah:

- a. Metode penelitian deskriptif-analitis di rancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Tujuan utama metode ini adalah

---

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Metedologi Riserch* (Yogyakarta: Andy offset, 1997), h. 9.

<sup>15</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Balai pustaka, 2006), h. 107.

untuk menggabarkan suatu kaadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian di lakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu.





## BAB II

### IMPEACHMENT KEPALA DAERAH MENURUT FIQH SIYASAH

#### A. Istilah Impeachment dalam Fiqh Siyasa

Persoalan *Impeachment* yang secara etimologis berarti pendakwaan, tuduhan atau panggilan untuk melakukan pertanggung jawaban,<sup>16</sup> Dan juga dapat berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk memintak pertanggung jawaban atas persangka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.<sup>17</sup>

Secara etimologis IMPEACHMENT mempunyai dua arti, pendakwaan, tuduhan panggilan untuk melakukan pertanggung jawaban. Dalam Black's Law Dictionary mendefinisikan *impeachment* sebagai : *A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called articles of impeachment*" sebuah prosedur pidana terhadap petugas public, sebelum pengandilan politik kuasai, yang di tetapkan oleh sebuah tuduhan tertulis yang di sebut artikel Impeachment. Sementara pengertian Impeachment di nyatakan sebagai : *the act (by legislative) of calling for the removal from office of public official, accomplished by presenting a written charge of the official's alleged misconduct*" tindakan legislatif menyerukan penghapusan dari kantor publik, dilakukan dengan menghadirkan mauatan tertulis dari kesalahan yang dituduhkan pejabat tersebut.<sup>18</sup>

Jika dihubungkan dengan kedudukan seorang pejabat negara atau kepala pemerintah, pengertian *impeachment* tersebut secara terminologis berarti pemanggilan atau pendakwaan yang

---

<sup>16</sup> Sapuan, *Kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam proses Impeachment Presiden*, (Purwekerto STAIN press, 2009), h. 56.

<sup>17</sup> Jimly Asshidiqie, "Kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam proses Impeachment Presiden", h.5, <http://www.theceli.com/pub/files/Impeachment/.doc>, akses 09 April 2017.

<sup>18</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (St. Paul, Minn.: West Group, 1991), h. 516.

dilakukan oleh lembaga legislatif kepada pejabat publik untuk dimintai pertanggungjawab atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam masa jabatannya.

Dari sisi bahasa, pemakzulan berasal dari kata, yaitu berhenti memegang jabatan, turun tahta, memakzulkan, berarti menurunkan tahta, memberhentikan jabatan. Kata makzul sendiri berasal dari bahasa asing yaitu bahasa Arab, dari akar kata عزل-عزل yang memiliki banyak arti yaitu memisahkan, menyinggirkan, mengasingkan diri, pemisahan dan pemecatan.<sup>19</sup>

Definisi Istilah pemakzulan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab makzul yang sudah dilakukan mempunyai arti berhenti memegang jabatan, turun tahta, memakzulkan artinya 1. Menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan 2. Meletakkan jabatannya (sendiri) sebagai raja, berhenti sebagai raja. Pemakzulan artinya proses cara perbuatan memakzulkan dengan pemberhentian dari jabatan, penurunan dari tahta atau jabatan.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam bahasa Inggris “makzul” menurut Hamdan Zoelva berarti *isolate*(mengasingkan), *setapart* (terpisah), *segregate* (memisahkan), *seclude* (menyendiri), *dismiss* (memecat), *discharge* (pemberhentian), *recall* (penarikan), *remove(from office)* memberhentikan atau memecat.<sup>21</sup>

Pemakzulan di dalam Islam dapat disinonimkan dengan *al-khalla'* yang berarti mencopot, mencabut, memecat, menelanjangi, menyingkirkan.

Ibnu Majhur mengatakan pencopotan sama artinya dengan mencabutnya hanya saja di dalam istilah pemecatan terkandung makna penangguhan atau proses secara perlahan. Istilah *al-khalla'* ini erat kaitanya dengan pelanggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa *al-khalla'* dapat disinonimkan dengan

---

<sup>19</sup> Achnad Warson Munnawir, *Kamus Al-Munawir versi Indonesia-Arab* (Surabaya Pustaka Progresif, 1997), h. 927.

<sup>20</sup> Kamus Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 865.

<sup>21</sup> Zoelva Hamdan, *Op. Cit.*, h. xiii.

pemecatan atau pemakzulan, namun dalam Ketatanegaraan Indonesia lebih di kenal dengan sebutan pemberhentian.<sup>22</sup>

Istilah pemberhentian dipadatkan dengan istilah pemakzulan yang memiliki konotasi yang sama dengan *Impeachment*.

Menurut istilah pemakzulan adalah tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatan dan kemungkinan larangan untuk memegang suatu jabatan, bukan sebagai hukuman pidana (*criminil conviction*) atau pengenaan ganti rugi perdata. Dalam istilah akademik pemakzulan adalah proses hukum ketatanegara untuk memecat atau menurunkan presiden atau pejabat lain nya dari jabatannya.<sup>23</sup>

## **B. Sejarah Impeachment dalam Kepemimpinan Islam**

Pada masa Nabi gagasan pemakzulan atau pemberhentian Kepala Daerah belum muncul dan belum dijelaskan secara rinci, cara pemberhentian Kepala Daerah tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Namun pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin sudah ada emberio dalam Impeachment Kepala Daerah.

Adapun pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin.

### **1. Masa 'Umar ibn Al-Khahthab**

Setelah dilantik menjadi Kepala Negara, 'Umar segera melaksanakan tugas kenegaraannya. Secara prinsip, 'Umar melanjutkan garis kebijaksanaan yang telah di tempuh abu bakar. Namun karena permasalahan yang dihadapi 'Umar semakin berkembang seiring dengan perluasan daerah islam.<sup>24</sup>

Luas daerah kekuasaan Islam ini membuat 'Umar merasa perlu membenahi dan menyempurnakan sistem yang telah yang dijalankan Khalifah Abu nakar sebelumnya.'Umar

---

<sup>22</sup>Ismail Yahya, *Hubungan Rakyat dan Penguasa Presfektif Sunnah* (Jakarta: Gema Insan press,1995), h. 191-193.

<sup>23</sup>Zoelva Hamdan, *Impeachment Presiden alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945, cet. II*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2014), h. 10.

<sup>24</sup>Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktri Politik Islam*, cet. I (Jakarta : Prenada media Group, 2016), h. 63.

mengadakan pembaharuan signifikan dalam bidang administrasi negara. Untuk pemerintah daerah, ‘Umar mengangkat gubernur untuk mempunyai otonomi luas. Mereka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembantu Khalifah. sebagaimana halnya lembaga peradilan di pusat yang terpisah dari kekuasaan eksekutif, di beberapa daerah juga diangkat beberapa hakim yang bebas dari pengaruh-pengaruh gubernur dan Khalifah. Mereka melaksanakan peradilan yang bebas dan mandiri. Dalam sebuah kasus, ‘Umar pernah memecat Ammar ibn Yasir sebagai gubernur Kufah karena “arus bawah” tidak merasa puas atas kepemimpinannya. Menurut masyarakat Kufah, Ammar tidak mengetahui seluk-beluk politik pemerintah, sehingga tidak pantas memegang jabatan tersebut.<sup>25</sup>

Dalam masalah suksesi ‘Umar menepuh cara yang berbeda dengan Abu Bakar sebelumnya. Setelah mengalami luka parah akibat ditikam seorang budak Persia bernama Abu Lu’luah para sahabat merasa khawatir kalau-kalau ‘Umar meninggal dunia tidak sempat meninggalkan pesan tentang penggantinya.<sup>26</sup>

## 2. Masa Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan

Banyak sejarawan yang mengatakan bahwa Utsman melakukan praktik nepotisme. Ia mengangkat pejabat-pejabat yang berasal dari kalangan keluarganya, meskipun tidak layak untuk memegang jabatan tersebut, banyak pejabat lama yang dipecatnya. Awal praktik nepotisme ini adalah pemecatan Al-Mughirah ibn Abi Syu’bah sebagai gubernur Kufah dan digantikan oleh Sa’d ibn Al-Ash, saudara sepupu Utsman. Namun Sa’d hanya setahun menduduki posisi itu karena digantikan oleh Al-Walid ibn ‘Uqbah yang juga masih saudara sepupu dengan Utsman.<sup>27</sup>

‘Amr ibn Al-‘Ash juga dipecat oleh Utsman dari jabatannya Gubernur di Mesir. Sebagai penggantinya, Utsman mengangkat Abdullah ibn Sa’d ibn Abi Sarh saudara

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 66.

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 73.

<sup>27</sup>*Ibid*. h. 80.

sepupunya. Tindakan ini dinilai ceroboh karena kedudukan 'Amr sebagai tokoh yang berjasa dalam menaklukan Mesir pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pemecatan 'Amr akhirnya menimbulkan protes di kalangan masyarakat Mesir. Mereka menuntut agar Utsman memulihkan kedudukannya kembali, apalagi penggantinya Abdullah, bukan tipe pemimpin yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Di Bashrah, gubernur Abu Musa Al-Asy'ari juga di berhentikan dan digantikan dengan saudara sepupunya bernama 'Abdullah ibn Amir Ibr Kuraiz sedangkan Mu,awiyah yang masih keluarganya tetap di berikan jabatan sebagai gubernur Syam, sebagaimana di atur Umar.<sup>28</sup>

### 3. Masa Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib

Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiaat Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah. Ali memerintah hanya enam tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil setelah menduduki jabatan khalifah. Ali memecat para gubernur yang di angkat oleh Usman. Di yakin bahwa pemberontakan-pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Dan dia juga menarik kembali tanah yang di hadiahkan Usman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakainya kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah di terapkan Umar.<sup>29</sup>

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi pemberhentian Kepala Daerah, ia memberhentikan gubernur-gubernur yang diangkat Utsman. Ali memberhentikan Abdullah ibn 'Amir gubernur Basrah digantikan oleh Utsman bin Junaif. Gubernur Kufah Sa'd ibn Al-Ash diberhentikan dan digantikan oleh 'Umarah ibn Syihab.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 78.

<sup>29</sup> Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam, Cetakan ke-24* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013 ), h. 39.

<sup>30</sup> Iqbal Muhammad, *Fikih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, cet. II* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 78.



Ali memberhentikan gubernur Syam yaitu Muawiyah, tetapi Muawiyah menolak untuk turun dari jabatannya dan memberontak terhadap pemerintahan Khlifah Ali sehingga terjadilah perang Siffin yang berlangsung selama (3) hari sejak tanggal 29 -31 juli 657 M, antara pasukan khlifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sofyan (602-680 M) yang ketika itu sebagai gubernur berkuasa di Syiria dan Mesir, merupakan peperangan di kalangan umat Islam, menggulingkan pemerintahan yang berkuasa (khilafah) untuk merebut kekuasaan. Peperangan ini disebut perang Siffin karena secara geografis medan pertempuran yang terjadi berada di kota Siffin daerah pinggiran sungai. Dalam peperangan ini pasukan Muawiyah telah tedeak kalah, sehingga menyebabkan mererka mengangkat Al-Qur'an sebagai tanda damai dengan cara tahkim, Khlifah di wakili oleh Abu Musa Al-Asyari, sedangkan Muawiyah di wakili oleh 'Amr bin Ash yang terkenal cerdas. Dalam tahkim tersebut khalifah dan Muawiyah harus meletakkan jabatannya, pemilihan baru harus dilaksanakan. Abu Musa pertama kali pertama kali menurunkan Ali sebagai khalifah, akan tetapi 'Amr bin Ash tidak menurunkan Muawiyah sebagai khalifah, karena Ali sudah di turunkan oleh Abu Musa, peperangan Siffin diakhiri dengan melalui tahkim (arbitrase). Yang di selesaikan oleh dua penengah sebagai pengadil.

Menurut Ahmad Syalabi, Abdullah bin Subair yang menyebabkan terjadinya pemberontakan yang banyak membawa korban tersebut. Dia berambisi besar ingin menduduki kahlifah untuk itu, ia menghasut bibi dan ibu asuhnya, Aisyah agar memberontak terhadap Ali dengan harapan Ali gugur dan ia menggantikan posisi Ali. Dengan tujuan mendapatkan kedudukan khalifah Muawiyah, gubernur Damskus memberontak. Selain banyak menimbulkan korban, Muawiyah berhasil mencapai maksudnya , sementara Ali terbunuh oleh bekas pengikutnya sendiri. Pemberontakan-

---

<sup>31</sup> Amir Munir Samsul, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta Amzah, 2009), h. 111-112.

pemberontakan yang muncul pada masa Ali ini bertujuan untuk menjatuhkannya dari kursi khilafah dan di gantikan oleh pemberontak itu.<sup>32</sup>

### C. Dasar Hukum Impeachment dalam Islam

Adapun dasar hukum pemakzulan dalam Islam

#### 1. Al-Qur'an

لَا مَنَاصَ لَكُم بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ يَتْلُونَ  
فِي السُّورَةِ الْقُرْآنِ فَإِذَا تَوَلَّوْا فَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ  
فَإِذَا تَوَلَّوْا فَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ  
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. ( An-Nisa 59).<sup>33</sup>

Di sebutkan kata *amri* (diantara kamu) setelah kata “ulil amri” pada ayat 59 surat An-nisa tersebut, menurut Al-Nabhani, merupakan pernyataan yang tegas, tentang adanya syari’at Islam bagi seorang *waliul amri*, selama dia masih menjadi *waliul amri*, kalau dia telah menjadi kafir, maka dia tidak lagi menjadi bagian dari kita (kaum muslimin).<sup>34</sup>

Firman Allah:

---

<sup>32</sup>Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, cetakan ke-24 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 39.

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Syamil Al-Qur'an, 2009) , h. 87

<sup>34</sup>Syarif ibn Muijib dan Zaid Khamami, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 175.

مَا بَعَثْنَا فِي بَيْنِهِمَا فَاَصْلَحُوا اَقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَاِنْ  
 فَاِنَّ اللَّهَ اَمْرٌ اِلَى تَفِيءٍ حَتَّى تَبْغِيَ الَّذِي فَقَتِلُوا الْاُخْرَى عَلَى اِحْدَنْهَا  
 مُقْسَطِينَ. تَحِبُّ اللَّهُ اِنْ وَاَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاَصْلَحُوا فَاَتَتْ



Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (AL-Hujurat: 9)

Melalui ayat ini Allah memerintahkan untuk memerangi kelompok pemberontak baik Imam mendukung kelompok ini ataupun mendukung kelompok yang adil- karena imam tidak di isyaratkan bersama kelompok yang adil-meski kelompok pemberontak yang wajib di perangi ini tidak disebut kafir, tapi masih disebut mukmin.

Untuk itu, ketika ada kelompok yang benar memberontak terhadap imam zalim meski dia tidak kafir secara nyata. Inilah praktik yang berlaku pada masa sahabat dan tabi'in, karena sebagian besar di antara mereka mendukung Abdullah bin Zubair kala pemberontak memerangi Bani Umayyah.<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Ad-Dumaiji Abdullah, *Op. Cit.*, h. 586.

## 2. Al-Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Abdullah bin Umar r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang di pimpinnya. Amir (Kepala Negara) adalah pemimpin manusia secara umum, akan di mintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin yang akan di mintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya. Dan setiap orang akan di mintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan tuannya, dia akan di mintai pertanggung jawaban atasnya, ketahuilah bahwa di setiap kalian adalah pemimpin dan akan di mintai pertanggung jawaban atas siapa yang di pimpinnya. “(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>36</sup>

Maksud hadis diatas adalah bahwa setiap pemimpin atau wakil Allah SWT mempunyai tanggung jawab yang besar atas kepemimpinannya, pemimpin harus mampu dalam memimpin negara, apa bila di mankir dan tidak bisa menjalankan kewajibannya, yang merupakan hak rakyat atau kepemimpinan itu lebih banyak kemudorotan yang di timbulkan dari

---

<sup>36</sup>Baqi Abdul Fuad Muhammad, *Al-lu'lu 'Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslimin* (Jakarta, Ulumul Qur'an , 2013), h. 834.

perbuatannya, maka pemimpin tersebut akan di mintai pertanggung jawabannya.

Menurut ibn Abi Rab'i , Al-Ghozali dan Ibnu Taimiyah bahwa kekuasaan kepala negara itu merupakan mandat dari Allah yang diberikan pada hamba pilihan-nya. Dengan kata lain, sumber dari kekuasaan kepala negara itu berasal dari tuhan, bukan dari rakyat karena itu rakyat tidak dapat memberhentikan di tengah jalan atau masa jabatannya belum berakhir. Bagi penganut pendapat ini kepala negara baru berhenti dari jabatannya atau baru bisa di ganti dengan figr lain setelah meninggal dunia.<sup>37</sup>

Menurut Al-Mawardi sebaliknya ia berpedapat, kekuasaan dan kedaulatan Kepala Negara itu Berasal dari rakyat melalui kontrak sosial, bukan dari tuhan. Senada dengan pendapat Al-Mawardi , Abd Al-Karim Zaidan, sebagaimana disinggung sebelumnya, menyatakan, sumber kekuasaan itu berasal dari rakyat, bukan dari tuhan. Karena kekuasaan dan kedaulatan Kepala Negara berasal dari rakyat, maka sewaktu-waktu, bila mana rakyat menghendaki, seorang Kepala Negara dapat di berhentikan di tengah jalan dan dapat di ganti dengan figur lain sebelum masa jabatannya yang di tentukan berakhir.<sup>38</sup>

#### **D. Mekanisme Impeachment Pemimpin dalam Islam**

Hal yang di sepakati ulama, Sebab Pemakzulan Iman :

##### **a. Kafir dan Murtad dalam Islam**

Di sebutkan dalam hadis riwayat Ubadah bin Shamit, ia berkata kami membaiat Rasulullah untuk mendengarkan dan menaati baik kami dalam kaadaan semangat maupun terpaksa, kami dalam kaadaan sulit maupun lapang, bahkan atas para pemimpin yang mementingkan diri mereka atas diri kami, serta kami tidak akan merebut kekuasaan dari orang yang memeganya kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata dan kalian memiliki buktinya dari Allah.

---

<sup>37</sup>Syarif Ibnu Muja dan Zada Khamami, *Op. cit.*, h. 167.

<sup>38</sup>*Ibid.* h. 168.

An-Nawawi berkata, maksud kafir dalam hadis ini adalah kemaksiatan makna hadis adalah : janganlah kalian merebut kekuasaan para pemimpin dan jangan menentang mereka, kecuali jika kalian melihat kemungkaran nyata yang kalian ketahui melalui kaidah-kaidah Islam

b. Meninggalkan Shalat dan Menyeru untuk meninggalkan Shalat

Ada sejumlah hadis sahih yang menguatkan pendapat ini di antaranya sabda Nabi perjanjian antara kami dan mereka (orang-orang munafik) adalah shalat maka siapa meninggalkannya ,ia kafir.

Pada posisi mana saja di antara kemungkinan kafir ataupun dosa besar karena meninggalkan shalat, Iman yang meninggalkan shalat wajib di pecat berdasarkan hadis-hadis terkait hal itu, juga hadis-hadis yang melarang Iman zalim, melarang pembatalan bait untu mereka ataupun memerangi mereka, dengan syarat mereka masih menegakkan shalat.

c. Tidak memutuskan perkara dengan Hukum yang diturunkan Allah

Faktor ini sama seperti faktor sebelumnya, baik dalam bentuk memutuskan perkara dengan hukum yang tidak diturunkan Allah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ataupun bentuk-bentuk yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam.

Hadis riwayat Anas bin Malik Rasulullah bersabda dengarlah dan taatlah meski kalian dipimpin seorang habasyah yang kepalanya (kecil) seperti anggur kering selama ia menegakkan kitab Allah di tengah kalian.

d. Fasik, zalim dan berbuat bid'ah

Ulama berbeda pendapat terkait hal ini yaitu :

- 1) Kalangan yang berpendapat Imam fasik harus di makzulkan secara mutlak
- 2) Kalangan yang menyatakan Imam tidak dimakzulkan karena kefasikan secara mutlak
- 3) Kalangan yang memberikan rincian dalam masalah ini.



e. Keterbatasan dalam bertindak

Alasan pemakzulan imam lainnya adalah keterbatasan dalam bertindak, misalkan Imam mengalami sesuatu yang membatasi atau bahkan menghentikan seluruh tindakannya. Keterbatasan dalam bertindak di katagorikan menjadi dua yaitu *al-hijr*(inhibisi/pencegahan) dan pemaksaan.

f. Tidak cakap

Faktor tidak cakap ini bisa disebabkan oleh lemahnya akal atau fisik berpengaruh terhadap gagasan ataupun pekerjaan. Kondisi ini ada sebagaimana yang menghalangi pengukuhan Imamah sejak awal dan menghalangi keberlangsungannya, berikut adalah faktor yang mengharuskan pemakzulan yaitu yang pertama hilang akal, karena gila atau yang lainnya, yang kedua kehilangan indera tertentu yang berpengaruh pada pikiran ataupun tindakan dan yang ketiga kehilangan sebagian anggota tubuh yang menghalangi aktivitas seperti kehilangan dua tangan dan dua kaki.<sup>39</sup>

Menurut Al-mawardi dalam bukunya Ahkam Sulthaniyah kondisi dibenarkannya Imam (khalifah mundur dari Imamah yaitu ada dua hal yang pertama keadilannya ternoda dan yang kedua tubuhnya cacat<sup>40</sup>

Menakisme pemakzulan dalam Islam tidak ditemukan penjelasa-penjelasan eksplisit dan meyakinkan, namun dalam kita-kitab *Fiqh* syasan setidaknya ditemukan beberapa cara atau mekanisme pemberhentian Kepala Negara dan Kepala Daerah. Ada tiga cara pemakzulan :

1. Imam Mengundurkan Diri

Ulama sepakat, ketika Imam merasa sudah tidak mampu lagi menunaikan beban dan tanggung jawab kepemimpinan, “ ia boleh mengundurkan diri. Al-Qurthubi berkata, 'ia wajib mengundurkan diri ketika

---

<sup>39</sup>Ad-Dumaiji Abdullah, *Op. Cit.*, h. 528-547.

<sup>40</sup>Imam Al-mawardi, *Ahkam Sulthaniyah* (jakarta,Qisthi Press, 2014),

merasa memiliki kekurangan peranannya dalam menjalankan Imamah.

Demikianlah hal jika pengunduran diri imam dapat meredakan gejolak yang sedang terjadi, dimana gejolak akan semakin meningkat dalam berlarut-larut ketika iman bersekukuh memegang jabatannya. Dalam situasi seperti ini, lebih baik seorang imam mengundurkan diri.

Oleh sebab itu kau muslimin secara keseluruhan memuji cucu Rasulullah Hasan bin Ali, ketika mengundurkan diri dari imamah dan menyerahkan kepada Mu'awiyah, setelah dia di baiat oleh penduduk Irak, agar darah kaum muslim tidak bertumpah.<sup>41</sup>

2. Pedang (perang dan revolusi bersenjata)

Cara pemakzulan ini adalah yang paling berbahaya dan umumnya memicu gejolak. Inilah cara yang di anut sekte Zaidiyah dan Khawarij oleh sebab itu mereka di sebut Khawarij yang secara bahasa berarti pemberontak. Cara ini juga di anut oleh sekte Mu'tazilah karena amar makruf dan nahi munkar merupakan salah satu dari lima asas mereka, juga di anut sebagian besar kalangan Mur'jiah, sebagai kalangan Asy'irah dan sebagian kalangan Ahlu Sunnah.<sup>42</sup>

3. Cara-cara Damai

*Ahlul Halli Wal' Aqdi* selaku pembaiat imam menemui imam tersebut, lalu menasihati dan mengingatkan dampak penyimpangan yang ia lakukan, memberinya waktu dan bersabar menghadapi sikapnya selang beberapa lama, dengan harapan imam tersebut menyadari kezaliman dan kesewenang-wenangan yang ia lakukan. Jika si imam bersikeras *Ahlul Halli Wal' Aqdi* berhak memberhentikan dengan cara yang memungkinkan. Dengan catatan, pemberhentian tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari pada

---

<sup>41</sup>Ad-Dumaiji Abdullah, *Op. Cit.*, h. 548.

<sup>42</sup>*Ibid.* h. 549-550.

kerusakan yang hendak di hilangkan. Sebab, pemberhentian imam termasuk wujud pencegahan kemungkaran, dan kemungkaran tidak boleh di hilangkan dengan kemungkaran yang lebih besar.

Cara lain dengan cara mogog massal seperti istilah yang tenar saat ini. Tat cara aksi sebagai berikut , ketika umat mengetahui bahwa imam mereka fasik, pembohong, zalim, dan tidak layak memegang *Imamah*, umat menyampaikan nasihat kepada imam, namun ia enggan menerima nasihat tersebut dan bersikap angkuh. Dalam kaadaan seperti ini umat harus memboikot imam dan orang-orang yang menjadi pengikurnya.<sup>43</sup>

Al-mawardi berpendapat dalam kitab nya *Al-Ahkam As-Sulthaamiyyah Fi Al-Wilaayaah Ad-Diinniyyah* dalam pemberhentian kepala daerah perlu di perhatikan hal-hal berikut. Kepala negara sudah mengangkat maka menteri Tafwidh mempunyai hak untuk memperhatikan dan memeriksa hasil kerjanya, tetapi dia tidak mempunyai hak untuk memberhentiaknya dari satu wilayah ke wilayah lainya. Namun jika menteri itu sendiri yang mengangkat ada dua kemungkinan:

1. Menteri mengangkat Kepala Daerah dengan seisi Kepala Negara dalam kasus ini menteri tidak boleh menurunkanya atau memindahkannya dari tugas nya ketugas lainya kecuali setelah mendapat izin dari Kepala Negara dan turun intruksi darinya. Jika menteri itu berhenti Kepala Daerah itu tidak berhenti.
2. Menteri mengangkatnya dengan inisiatif sendiri dan Kepal Daerah itu sebagai tugas perwakilan wewenangnyanya. Menteri dapat dengan sendirinya memecatnya dan menggantikanya dengan orang lain, sesuai dengan hasil ijtihadnya dalam melihat yang

---

<sup>43</sup>*Ibid.* h. 551.

terbaik dan paling cocok untuk menduduki jabatan itu.

Pada saat menteri itu berhenti Kepala Daerah pun ikut berhenti jika Kepala Negara mengesahkan jabatannya , sehingga hal itu menjadi pembaharuan jabatannya dan permulaan pangkatnya, namun dalam peresmian jabatan itu tidak lagi di butuhkan syarat-syarat seperti yang harus dipenuhi saat akan di angkat pertama kali. Kepala negara cukup berkata.”aku akui jabatan yang engkau pegang”.<sup>44</sup>

Menurut Al-Baghdadi sebagaimana di kutip J Suyuthi pulungan menjelaskan bahwa seorang kepala daerah yang tanpa cacat dan tindakannya tidak bertentangan dengan syari’at, umat wajib mendukung dan menaatinya. Tapi bila ia menyimpang dari ketetapan syari’at masyarakat harus memilih di antara dua tindakan kepadanya, yaitu mengembalikannya dari perbuatan salah kepada kebaikan, atau mencopot jabatannya dan memeberikan pada yang lain. Menurut Al-Juwaini Kepala Daerah yang di angkat melalui pemilihan tidak boleh memberhentikananya kecuali ada suatu peristiwa dan perubahan sesuatu pada dirinya yang membolehkannya untuk hal ini sudah menjadi kesepakatan apabila ia *fasiq* da *fai’ir* (perbuatan dosa dan tidak berlaku adil) maka memberhentikananya adalah mungkin. Di katakan mungkin karena tidak ada dasar hukum (ketetapan) untuk memberhentikananya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Imam Al-Mawardi, *Huku Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, penerjemah Abdul Hayyio Al-kartini, Kamaludin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 200), h. 64-65.

<sup>45</sup>Pulunagan J Syuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT . Raja Grapind Persada, 1995), h. 261-262.

### BAB III

## **IMPEACHMENT KEPALA DAERAH DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA**

### **A. Pengertian Impeachment**

Konsep *Impeachment* lahir di Mesir kuno dengan istilah *iesangelia*, kemudian pada abad ke-17 diadopsi oleh pemerintahan Inggris dan dimasukkan dalam konstitusi Amerika Serikat pada akhir abad ke-18. Konsep *impeachment* dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat adalah mekanisme pemberhentian pejabat negara karena melanggar pasal-pasal *impeachment*, yaitu penghianatan terhadap negara, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi lainnya, dan perbuatan tercela (*treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors*).<sup>46</sup>

Kamus besar bahasa Indonesia merumuskan kata makzul yang artinya berhenti memegang jabatan, turun tahta. Memakzulkan yaitu menurunkan dari tahta, meberhentikan dari jabatan. Meletakkan jabatannya sebagai raja, berhenti sebagai raja.<sup>47</sup>

Dalam mengartikan kata “*pemakzulan*” dan “*Impeachment*” sebagai suatu hal yang sama, yaitu suatu proses untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil presiden dalam masa jabatannya, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Atau perbuatan tercela terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7A UUD 1945.<sup>48</sup> Secara sederhana pemakzulan adalah pendakwaan dan hukum legislatif kepada badan tinggi negara. Dalam kasus ini berarti DPR ke Presiden. Jika ada unsur DPR yang mengusulkan pemakzulan dan ada

---

<sup>46</sup>Indrayana Denny, *Negara Antara ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan* (Jakarta, Kompas, 2008), h, 207-208.

<sup>47</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 865.

<sup>48</sup>Khairudin dan Muda Iskandar, *Pokok-pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h. 156.

pihak yang dikenakan pemakzulan, yaitu Presiden dan wakil presiden.

Jimmy Asshiddiqie menyatakan bahwa *Impeachment* bukan merupakan turunnya, berhentinya atau di pecatnya presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya. Sesungguhnya arti *Impeachment* sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga pranata *Impeachment* lebih menitik beratkan dalam hal prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya presiden atau tinggi negara dari jabatannya.<sup>49</sup>

Secara umum *Impeachment* atau pemakzulan dapat dipahami sebagai turunnya, berhenti atau di pecatnya presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. *Impeachment* berlaku pada sistem pemerinthan itu presidensial maupun parlementer. Karena secara historis peraktik, impeachment itu untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang amat “powerfull” yang berkaitan dengan kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa.<sup>50</sup>

## **B. Sejarah Impeachment Kepala Daerah di Indonesia**

Adapun kepala daerah yang pernah di Impeachment di Indonesia sebagai berikut.

### **1. Impeachment Bupati Garut Aceng Fikri**

Perwakilan Rakyat Daerah Garut sepakat untuk memberhentikan Aceng Fikri HN dari jabatan bupati. Namun keputusan ini baru final setelah ada rekomendasi ke Mahkamah Agung (MA). Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, mengatakan bahwa rekomendasi DPRD Garut itu tidak serta merta bisa langsung memberhentikan Aceng Fikri dari jabatannya. Pemberhentian seseorang dari jabatan bupati harus mengaju pada sejumlah peraturan berikut ini. Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

---

<sup>49</sup>Hamdan Zoelva, *Pemakzulan presiden di indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 8.

<sup>50</sup>Munir Subarman, *hukum islam dan ketatanegaraan* (Cirebon: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 369.



Wakil Kepala Daerah dan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang DPRD.

Proses di DPRD itu sifatnya hak menyatakan pendapat lembaga DPRD. Itu refleksi dan sikap politik dari fraksi-fraksi di DPRD, sekaligus representasi rakyat. Tapi untuk memberhentikan kepala daerah harus melalui mekanisme tersebut," kata Reydonnyzar kepada *VIVAnews*. Setelah melalui proses di DPRD, lanjutnya, kemudian disampaikan ke Mahkamah Agung. Di MA, hasil rekomendasi DPRD ini diuji paling lambat 30 hari. Mahkamah Agung kata Reydonnyzar, wajib memeriksa, mengadili dan memutuskan rekomendasi DPRD tersebut.

Sekiranya rekomendasi DPRD itu diterima dan dinyatakan benar, lalu di kembalikan lagi ke DPRD. Kemudian DPRD bersidang lagi untuk mengambil keputusan," jelasnya.

Sidang paripurna yang dihadiri 3/4 jumlah anggota sidang dan putusan diambil dengan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Lalu, apakah nanti di DPRD terjadi perubahan sikap? Reydonnizar menegaskan, "Di sidang DPRD ini tidak mungkin terjadi deal-deal politik. Karena keputusan Mahkamah Agung sudah mengikat, harus dipatuhi. Jadi tidak mungkin ada keputusan lain di DPRD," jelasnya.

Setelah itu, kata Reydonnizar, presiden melalui Menteri Dalam Negeri memproses usul pemberhentian paling lambat 30 hari. Kemudian oleh Mendagri, Aceng akan diberhentikan dari jabatannya sebagai bupati Garut.

Saat ini Aceng masih menjabat bupati. Biarkan proses yang ada di DPRD ini berjalan dan mekanisme yang ditempuh melalui Mahkamah Agung. Semua pihak harus menghormati itu," tuturnya.<sup>51</sup>

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai Bupati Garut Aceng HM Fikri telah melanggar etika, bahkan peraturan perundang-undangan terkait kasus nikah siri selama

---

<sup>51</sup> Aris Setiawan, "Mekanisme Pemberhentian Bupati Aceng Fikri". *Viva News*, 22 Desember 2014.

empat hari dengan Fani Oktora, gadis berusia 18 tahun asal Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Gamawan menjelaskan, di dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan siri yang tidak dicatat, kata Gamawan, merupakan sikap tidak taat kepada UU.

Padahal, dalam sumpah janji, kepala daerah wajib taat pada peraturan perundang-undangan," kata Gamawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/12/2012).

Gamawan menilai ada pelanggaran etika terkait perceraian Aceng. Padahal, seorang pemimpin, kata dia, semestinya menjadi contoh yang baik di hadapan publik. Bupati wajib memelihara etika dalam menyelenggarakan pemerintahan seperti diatur dalam Pasal 27 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah.

**Pemberhentian** Gamawan menambahkan, dalam Pasal 29, diatur pemberhentian bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan etika pemerintahan. Tahap awal mekanisme pemberhentian, DPRD harus mengambil keputusan bahwa Aceng terbukti melanggar etika.

Rapat itu harus dihadiri minimal tiga perempat dari total anggota DPRD. Jika *voting*, keputusan harus disetujui oleh dua pertiga dari yang hadir. Jika DPRD menganggap ada pelanggaran etika, kata Gamawan, keputusan itu dibawa ke Mahkamah Agung (MA).

MA akan uji nanti. Dalam waktu 30 hari, MA harus sudah menyatakan sikapnya setuju atau tidak (atas putusan DPRD). Hasil uji MA akan dikembalikan ke DPRD, lalu DPRD ambil keputusan dan kirimkan ke presiden. Dalam 30 hari, presiden juga tentukan sikapnya," pungkas Gamawan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Sandro Gatra, "Mendagri: Bupati Garut Langgar UU". Kompas, 03 desember 2012.

## **2. Impeachment Bupati Katingan Ahmad Yantenglie**

Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Ignatius Martir telah mengetahui isi putusan Mahkamah Agung(MA) terkait pemakzulan Bupati Katingan Ahmad Yantengli. Proses ini akan dilanjutkan dengan menyurati Kemendagri untuk pengesahan SK jabatan yang baru.kami terima kasih MA sudah obyektif menilai, apa yang dilakukan DPRD itu sudah sesuai UU.

Dan kedua langkah itu tidak berhenti sampai di situ aja, karena yang menghentikan itu Mendagri atas dasar uji pendapat. Nanti kita akan proses lagi menyurati Mendagri melalui Gubernur Kalteng," ujar Ketua DPRD Katingan, Ignatius Martir kepada detikcom, Jumat (31/3/2017). Ignatius mengatakan sesuai ketentuan UU, setelah surat dikirim ke Kemendagri, maka pemerintah hanya punya waktu satu bulan untuk mengeluarkan SK tersebut.

Menteri punya waktu satu bulan untuk mengeluarkan putusan," paparnya.Ignatius sendiri mengaku belum dapat memastikan pengiriman surat permohonan itu ke DPRD Katingan. Alasannya, pihaknya belum menerima berkas putusan MA secara fisik.Dalam jangka waktu tidak lama lagi saya bersama beberapa anggota akan menjemput itu, ya kira-kira minggu depan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, MA mengabulkan pemakzulan Ahmad Yantengli sebagai Bupati Katingan. Yantengli dianggap telah melakukan perbuatan tercela, dan mengakui dirinya selingkuh dengan wanita lain. Mengabulkan Permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan. Menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, melanggar Etika dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Bupati Katingan, berdasar hukum," ujar ketua majelis Supandi dengan anggotanya Is Sudaryono dan Yulius.

Dalam pertimbangannya, hakim melihat kalau Ahmad Yantengli sebagai pejabat publik telah memiliki

istri.Sedangkan Farida Yeni dengan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), masih memiliki hubungan sah dengan Aipda Sulis Heri.

Cara berpikir Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) bersifat dichotomi dengan mengabaikan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengabdikan/memperkuat hukum Islam tentang Perkawinan," pungkasnya.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan pemakzulan Ahmad Yantengli sebagai Bupati Katingan.Yantengli dianggap telah melakukan perbuatan tercela dan mengakui dirinya selingkuh.

Kasus bermula ketika Ahmad Yantengli dengan Farida Yeni tertangkap basah selingkuh oleh suami Farida, Aipda Sulis Heri Suyanto, di kawasan Kasongan, Jumat (6/1) lalu.Sulis terperanga melihat istrinya tengah tidur bersama Yantengli tanpa sehelai benang. Keduanya pasangan selingkuh itu pun di bawa ke kantor polisi.

Singkat cerita, perkara asusila ini terungkap ke DPRD dan masyarakat, Yantengli dianggap telah mencemarkan nama baik Katingan dan Adat Kalimantan. Masyarakat pun melakukan aksi protes di DPRD Kabupaten Katingan.Mereka meminta DPRD untuk memakzulkan Ahmad Yantengli dari jabatan sebagai kepala daerah.Tak lama dari aksi protes itu, Aipda Sulis membuat laporan ke Polda Kalimantan Tengah. Sulis menuntut proses hukum yang adil atas perbuatan Yantengli, karena dianggap merusak bahtera rumah tangga mereka. Laporan itu semakin memantapkan DPRD Katingan untuk pemakzulan.

Sayangnya di tengah perjalanan, Aipda Sulis mencabut laporan tanpa alasan jelas.Meski begitu, DPRD tetap pada langkahnya untuk memakzulkan Ahmad Yantengli sebagai Bupati Katingan.Konsolidasi dan kordinasi terus dilakukan legislatif dengan mendatangi DPRD Garut, Kemendagri dan MA.

Puncaknya pada tanggal 18 Februari 2017, Seluruh Fraksi di DPRD Kabupateng Katingan sepakat untuk

mengusulkan pemberhentian kepada Ahmad Yantengli sebagai Bupati Katingan. Sedangkan Ahmad Yanteng tetap pada pendiriannya tidak mau mundur, dan menanggapi kalau hubungan dengan Farida Yeni bukan perselingkuhan. Lalu apakah kata MA ?

Mengabulkan Permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, melanggar Etika dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Bupati Katingan, berdasar hukum," ujar ketua majelis, Supandi dengan anggotanya Is Sudaryono dan Yulius sebagaimana dikutip detikcom dari website MA, Jumat (31/3/2017).

Dalam pertimbangannya, hakim melihat kalau Ahmad Yantengli sebagai pejabat publik telah memiliki istri. Sedangkan Farida Yeni dengan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), masih memiliki hubungan sah dengan Aipda Sulis Heri

"Cara berfikir Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) bersifat dikotomi dengan mengabaikan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengabdikan/memperkuat hukum Islam tentang Perkawinan.<sup>53</sup>

Nasib Bupati Katingan Ahmad Yantenglie di ujung tanduk. Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan pemakzulan Yantenglie yang diusulkan DPRD Katingan.

Rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada Rabu (29/3) yang dipimpin Ketua Majelis, Supandi dan anggota Is Sudaryono dan Yulius memutuskan bahwa Yantenglie melanggar sumpah dan janji jabatan.

---

<sup>53</sup> Edward Febriyanti Kusuma, "MA Kabulkan Pemakzulan Bupati Katingan Karena Selingkuh". *Detik News*, 31 Maret 2017.

Selain itu, Yantenglie juga dianggap melanggar UU Perkawinan karena tidak mencatatkan pernikahan keduanya dengan Farida Yeni.<sup>54</sup>

### **3. Impeachment Bupati Pesawaran Doddy**

Pasalnya, selain akan mendekam di penjara selama 4 tahun atas vonis Mahkamah Agung (MA) Nomor 2310K/Pid.Sus/2013, adik mantan Bupati Pesawaran itu juga terancam dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (KPMP2T) kabupaten setempat.

Bahkan, jika mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor: 800/4329/SJ tertanggal 29 Oktober 2012 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), Doddy terancam dipecat dari PNS.

Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga pernah mengeluarkan instruksi kepada seluruh instansi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang dijatuhi hukuman pidana.

Di dalam Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012 tentang PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana, ditegaskan harus diberhentikan dengan tidak hormat.

Dalam keterangan persnya belum lama ini, Kepala BKN Eko Sutrisno menyebut, di dalam Pasal 23 ayat 3 UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dengan tegas menyebutkan PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara, dengan putusan yang sudah punya kekuatan hukum tetap atas tindak pidana kejahatan jabatan. Di surat tersebut, sudah dijelaskan regulasi tentang pemberhentian tidak hormat terhadap PNS yang dijatuhi hukuman pidana karena jabatan,” kata Eko Jadi tindak pidana kejahatan jabatan ini maksudnya PNS yang menggunakan jabatannya untuk melakukan tindak

---

<sup>54</sup> Ridwan, “ini Salinan putusan MA terkait Pemakzulan Bupati Katingan Ahman yantenglie”. *Pojok Satu*, 1 April 2017.



pidana seperti korupsi dan lainnya,” ujarnya. Adapun mekanisme pemberhentiannya, terang Eko, untuk PNS golongan IVc ke atas penetapannya dilakukan presiden. Sedangkan golongan IVb ke bawah pemberhentiannya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian baik pusat maupun daerah.

Gubernur memberhentikan PNS kabupaten/kota untuk tingkat pembina, golongan IVA, pembina tingkat satu, dan golongan IVb. Sedangkan pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota memberhentikan PNS di level penata tingkat satu, golongan IIIId ke bawah,” jelasnya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pesawaran Zainal Arifin mengatakan, pihaknya menunggu kepastian hukum terhadap Doddy. Memang di website MA sudah terbit vonis terhadap Doddy, tapi kan salinan resminya belum ada. Jadi kita masih menunggu untuk bisa menjatuhkan sanksi,” katanya kepada [harianlampung.com](http://harianlampung.com).

Hingga saat ini, BKD belum menerima surat putusan atau surat tembusan resmi atau pemberitahuan, baik dari kejaksaan ataupun dari pengadilan yang menyatakan bahwa Doddy Anugerah ini sudah bersalah. “Jadi kami menganggap dia (Doddy) masih sebagai seorang PNS seperti biasanya, dan belum bisa mengambil langkah apapun,” kilanya. “Saya justru baru tau bahwa Doddy ini sudah divonis, dari pemberitaan di koran,” tambahnya.

Hal sama dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Arinal Djunaidi. Menurut dia, Pemprov akan menunggu salinan putusan itu terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan terhadap Dody Anugerah. “Sesuai aturan, jika vonis di atas 2 tahun harus berhenti, kalau di bawah 1 tahun itu ada masa pembinaan,” katanya. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pihak kejaksaan di Provinsi Lampung, mengeluarkan surat pencekalan terhadap R. Doddy Anugerah Putra, terpidana korupsi pengadaan mobil dinas bupati Pesawaran, senilai Rp1,1 Miliar. Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Yuntho mengatakan, jika

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda beralasan belum bisa mengeksekusi terpidana, paling tidak ada langkah antisipasi agar yang bersangkutan tidak melarikan diri.

Sudah sewajarnya hal itu (pencekalan,Red) dilakukan. Karena Kejaksaan di Lampung sudah dua kali kecolongan dalam kasus serupa,” kata Emerson melalui sambungan teleponnya,

Kepada *harianlampung.com*, Selasa (6/10). Menurut dia, dengan terbitnya vonis Mahkamah Agung (MA) nomor: 2319K/Pid.Sus/2013, sebenarnya sudah bisa dijadikan landasan untuk mengeksekusi terpidana. Meski baru sebatas petikan, sebenarnya Jaksa bisa menahan. Caranya, bisa dibuat semacam kesepakatan bersama antara jaksa, kuasa hukum dan terpidana itu sendiri<sup>55</sup>

#### **4. Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno**

Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah [operasi tangkap tangan](#) di Jawa Tengah.

Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan segera menunjuk Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Nur Sholeh sebagai Plt Wali Kota "Kalau langsung ditahan KPK, segera Kemendagri menunjuk wakil wali kota sebagai Plt (wali kota)," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Selasa (29/8/2017). Penunjukan Plt Wali Kota Tegal itu agar jalannya roda pemerintah di kota yang menjadi "eksportir" warung tegal (Warteg) itu tidak terganggu.

Agar jalannya pemerintahan di pemerintah kota (Tegal) tetap berjalan seperti biasa," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu. Meski demikian, sampai saat ini Tjahjo mengaku masih menunggu keterangan resmi dari lembaga anti-rasuah terkait OTT yang baru saja dilakukan kepada jajarannya di daerah.

---

<sup>55</sup> Ilham, "Sanksi Pecat Menanti Dody", *Harian Lampung*, 3 maret 2018.

Sikap secara resmi belum. Menunggu pengumuman resmi KPK saja dulu," tutup dia. Diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan bahwa [Wali Kota Tegal ditangkap KPK](#) dalam operasi tangkap tangan. "Betul ada OTT di Jateng, tunggu konpers," ujar Agus saat dikonfirmasi, Selasa (29/8/2017) malam. Menurut informasi, Siti ditangkap sesuai menggelar rapat di kantornya. Namun, hingga saat ini KPK belum memberikan informasi detail terkait perihal penangkapan tersebut. Siti masih dalam pemeriksaan intensif KPK. Rencananya, KPK akan menggelar konferensi pers pada Rabu (30/8/2017).<sup>56</sup> Itulah beberapa contoh Pemakzulan Kepala Daerah di Indonesia.

#### 5. Gubernur Banten Ratu Atut

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara dugaan suap sengketa gugatan Pilkada Lebak, Banten sejak Selasa 17 Desember 2013.

Hanya berselang 3 hari, KPK pun langsung menahan Atut di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kendati demikian, hingga kini Atut masih menjabat sebagai Gubernur Banten.

Meski berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Ratu Atut baru dapat dinonaktifkan bila kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan dan ia berstatus sebagai terdakwa, namun menurut pengamat hukum tata negara, Refly Harun, demi efektifitas pemerintahan di Banten, adalah lebih baik jika Ratu Atut mengundurkan diri dari jabatannya.

Bila menunggu proses hukum sampai yang bersangkutan divonis pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap, akan lama. Kasihan masyarakat Banten," ujar Refly Harun dalam pesan tertulisnya kepada **Liputan6.com** di Jakarta, Selasa (24/12/2013).

---

<sup>56</sup>Moh Nadlir, "Wali Kota Tegal Siti Masita ditangkap Kemendagri siapkan pengganti", Kompas, 29 Agustus 2017.

Selain itu, meski di dalam penjara jabatan gubernur masih disandang, namun kata Refly, sebaiknya Ratu Atut tidak mengambil keputusan apapun dan menyerahkan seluruh kebijakan pemerintahan kepada Wakil Gubernur. Terlebih bila keputusan tersebut berpengaruh pada kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.

Tentu preseden yang tidak baik apabila roda pemerintahan dikendalikan dari balik jeruji penjara," kata Refly.

Pada kesempatan itu, Refly juga mendesak DPRD Provinsi Banten segera mengambil langkah pemakzulan (*impeachment*) karena Ratu Atut setidaknya telah melanggar beberapa pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Salah satunya adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 48 huruf b dan huruf c yang berbunyi 'membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan kelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan atau golongan masyarakat lain'.<sup>57</sup>

### C. Dasar Hukum Impeachment di Indonesia

Adapun dasar Hukum Impeachment Kepala Daerah di menurut Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR 23 Tahun 2014 tentang kepala daerah :

Paragraf 5

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 78

- 1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.

---

<sup>57</sup> Taufik Qurahman, "DPRD Banten di mintak Lengserkan Ratu Atut dari Gubernur", Liputan 6, 24 Desember 2013.

- 2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
  - e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
  - f. melakukan perbuatan tercela;
  - g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
  - i. mendapatkan sanksi pemberhentian.
- Pasal 79
1. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
  2. Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden

memberhentikan gubernur dan/atau wakilgubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kotadan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

3. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.<sup>58</sup>

#### **D. Mekanisme Impeachment Kepala Daerah di Indonesia**

Mekanisme Impeachment Kepala Daerah di Indonesia mengalami beberapa tahap dan perjalanan yang juga melewati aspek hukum dan politik. Sesuai dengan UU NO 9 Tahun 2015 perubahan atas UU NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemberhentian di bendakan menjadi beberapa alur sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

Pada pasal 79 Undang-Undang No 9 Tahun 2015 di jelaskan :

1. Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat 2 huruf a dan huruf b di umumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan di usulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau Wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
2. Dalam hal ini pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagai mana di maksud dalam ayat (1), presiden

---

<sup>58</sup> Amandemen Undang-Undang Pemda, UU RI NO 9 Tahun 2015. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), h. 99-100.



memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usulan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

3. Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota sebagai mana di maksud pada ayat (2), menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Proses pemberhentian di atas pada pasal 79 Undang-Undang No 9 Tahun 2015 hanya berlaku pada kasus Kepala Daerah yang meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah:

Pada pasal 80 Undang-Undang No 9 Tahun 2015 di jelaskan :

- 1) Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f di laksanakan dengan ketentuan:
  - a. Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah di usulkan kepada presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan keputusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah dinyatakan melanggar sumpah/atau janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah sebagai mana di maksud dalam pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah sebagai mana di maksud dalam pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela;
  - b. Pendapat DPRD sebagai mana di maksud pada huruf a di putusan melalui rapat paripurna DPRD yang di hadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga seperempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan di ambil dengan

persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;

- c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD di terima Mahkamah agung dan putusannya bersifat final;
  - d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah terbukti melanggar sumpah /janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usulan kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota:
  - e. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak presiden menerima usulan pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD; dan
  - f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menteri menerima usulan pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD. .
- 2) Dalam hal pimpina DPRD menyampaikan usulan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf d paling lambat 14 (empat belas) hari sejak di terima pemberhentian putusan Mahkamah Agung, presiden meberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usulan Menteri dan menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usulan gubernur sebgai wakil pemerintah pusat.

- 3) Dalam hal gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat tidak menyampaikan usulan kepada Menteri sebagai mana di maksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah sebagai mana di maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) di atur dalam peraturan pemerintah.

Proses pemberhentian di atas pada pasal 80 Undang-Undang NO 9 Tahun 2015 berlaku untuk Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sumpah/janji, tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai mana di maksud dalam pasal 67 huruf b, melanggar larangan Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah sebagai mana di maksud dalam pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela pada pasal ini usulan DPRD berpengaruh untuk memproses pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah. Di usulkan kepada presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa Kepala Daerah dinyatakan melanggar apa yang terdapat dalam pasal 80 UU NO 9 Tahun 2015.

Pada pasal 81 Undang-Undang No 9 Tahun 2015 di jelaskan:

- 1) Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 80 ayat (1), pemerintah pusat memberhentikan Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah yang:
  - a. Melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah;
  - b. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagai mana di maksud pasal 67 huruf b;
  - c. Melanggar larangan sebagaimana di maksud dalam pasal 76 kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau

- d. Melakukan perbuatan tercela.
- 2) Untuk melaksanakan pemberhentian sebagai mana di maksud pada ayat(1), pemerintah pusat melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil Kepala Daerah.
  - 3) Hasil pemeriksaan di mana di maksud pada ayat (1) di sampaikan oleh pemerintah pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah.
  - 4) Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah pusat memberhentikan Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah.
  - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah oleh pemerintah pusat sebagaimana di maksud dalam pada ayat (1) sampai dengan (4) di atur dalam peraturan pemerintah.

Proses pemberhentian pada pasal 81 Undang-Undang No 9 tahun 2015 sama halnya dengan pasal 80 tetapi yang membedakan adalah pada pasal ini DPRD tidak mengajukan usul untuk memberhentikan Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah terhadap presiden maupun Menteri, Melaikan pemerintah pusat yang melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang di lakukan Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah, hasil tersebut di sampaikan kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan keputusa:

Pasal 83 Undang-Undang No 9 Tahun 2015:

- 1) Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah berhenti sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana teroris, makar, tindak pidana

- terhadap keamanan negara, dan/atau perubahan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
  - 3) Pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di lakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
  - 4) Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah di berhentikan tanpa usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana di maksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - 5) Pemberhentian sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pada Pasal 83 Undang-Undang No 9 Tahun 2015, menjelaskan proses berhentinya Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah yang melakukan tindakan pidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan dari pengadilan. Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah yang di berhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apa bila telah terbukti dan mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tindakan yang di maksud dalam pasal 83 adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana teroris, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perubahan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada dua status pemberhentian seorang Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah pada pasal ini yaitu, “diberhentikan sementara” dan “diberhentikan”.

Pengertian dari “diberhentikan sementara” di jelaskan pada pasal 83 ayat (1) dan (2) Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana di maksud pada ayat

(1) di berhentikan sementara sementara berdasarkan register perkara di pengadilan atau dengan kata lain proses hukumnya masih berjalan sedangkan “diberhentikan” di jelaskan pada pasal 83 ayat (4) Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah di berhentikan jika kasus tindakan pidana yang dilakukan Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah telah memiliki kekuatan hukum tetap berbeda hal nya dengan pasal 80, pada pasal 83 tidak membutuhkan usulan dari DPRD untuk memberhentikan Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah. Pemberhentian sementara ataupun pemberhentian dilaksanakan langsung oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur. Mendagri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup>*Ibid.* h. 100-107.



## **BAB IV**

### **IMPEACHMENT KEPALA DAERAH DI INDONESIA MENURUT FIQH SIYASAH**

#### **A. Impeachment Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia**

Jimmy Asshiddiqie menyatakan bahwa *Impeachment* bukan merupakan turunnya, berhentinya atau di pecatnya Presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya. Sesungguhnya arti *Impeachment* sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga pranata *Impeachment* lebih menitik beratkan dalam hal prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunya presiden atau tinggi negara dari jabatannya.

Secara umum *Impeachment* atau pemakzulan dapat dipahami sebagai turunnya, berhenti atau di pecatnya presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. *Impeachment* berlaku pada sistem pemerintahan itu presidensial maupun parlementer. Karena secara historis praktik *impeachment* itu untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang amat "*powerfull*" yang berkaitan dengan kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa.

Contoh dari pemakzulan Kepala Daerah di Indonesia yaitu Bupati Garut Aceng Biki, *Impeachment* Bupati Pesawaran Doddy, *Impeachment* Bupati Katingan Ahmad Yantenglie, gubernur Banten Ratu Atut dan masih banyak contoh yang lain.

Dasar Hukum *Impeachment* kepala daerah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 78 dan 79 .

Mekanisme *Impeachment* Kepala Daerah di Indonesia Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 79, pasal 80, pasal, 81 dan pasal 83.

Berdasarkan fakta kasus yang terjadi di indonesia mengenai pemakzulaan kepala daerah pada pasal 78 ayat c UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memang menjadi Alasan Kepala Daerah untuk di makzulkan karena tidak dapat

melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan selama 6 bulan, di nyatakan melanggar sumpah janji Kepala Daerah dan melanggar larangan Kepala Daerah dalam Pasal 76.

Adapun kasus pemakzulan Kepala Daerah di Indonesia terjerat pasal 78 ayat c yaitu di berhentikan dengan alasan melanggar pasal 76 yaitu melanggar larangan Kepala Daerah seperti Korupsi, Suap, Nepotisme serta meneriama uang ataupun barang.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa di Indonesia sudah di atur mengenai Impeachment Kepala Daerah namun terlepas dari semua hal yang di jelaskan di atas masih perlu banyak revisi lagi terhadap UU tersebut jangan sampai UU yang mengatur tentang pemerintah daerah ini hanya di jadikan sebagai jalan untuk menurunkan kepala daerah tanpa alasan yang jelas atau bisa dikatakan hanya kepentingan politik semata bukan berdasarkan pelanggaran yang dia lakukan atau berdasarkan fakta.

## **B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Impeachment Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia.**

Tinjauan fiqh siyasah terhadap Impeachment Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan teori pada bab sebelumnya mengenai Impeachment Kepala Daerah Menurut fiqh siyasah.

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri

Pemakzulan di dalam Islam dapat di disinonimkan dengan *al-khalla'* yang berarti mencopot, mencabut, memecat, menelanjangi, menyingkirkan. Ibnu Majhur mengatakan pencopotan sama artinya dengan mencabutnya hanya saja di dalam istilah pemecatan terkandung makna penangguhan atau proses secara perlahan. Istilah *al-khalla'* ini erat kaitanya dengan pelanggaran. Jadi dapat di simpulkan bahwa *al-khalla'* dapat disinonimkan dengan pemecatan atau pemakzulan, namun dalam

Ketatanegaraan Indonesia lebih di kenal dengan sebutan pemberhentian.

Pada masa Nabi gagasan pemakzulan atau pemberhentian Kepala Daerah jelas belum muncul dan belum dijelaskan secara rinci, cara pemberhentian Kepala Daerah tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi adapun dalam sejarah pemerintahan Rasulullah SAW dan Al-Khulafa Al-Rasyidin.

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan Imam di Makzulkan menurut Ulama yaitu Kafir dan Murtad dalam Islam, Meninggalkan Shalat dan Menyeru untuk meninggalkan Shalat, Tidak memutuskan perkara dengan Hukum yang diturunkan Allah, Fasik, zalim dan berbuat bid'ah, Keterbatasan dalam bertindak dan Tidak cakap.

Menurut Al-mawardi dalam buku nya Ahkam Sulthaniyah kondisi dibenarkanya Imam (khalifah mundur dari Imamah yaitu ada dua hal yang pertama keadilanya ternoda dan yang kedua tubuhnya cacat

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di analisis oleh penulis bahwa tinjauan fiqh siyasah terhadap Impeachment di Indonesia dalam pandangan fiqh siyasah bahwa Pemakzulan itu terjadi karena tidak ada kepercayaan lagi rakyat terhadap Imam sehingga timbul gejolak seperti pada saat zaman khalifah Umar Bin Khatab, Utsman Bin Affa dan Ali Bin Abi Thalib sebenarnya lebih spesifik ini hanya embrio lahirnya Impeachment dikalangan umat Islam.

Proses Impeachment yang terjadi di Indonesia semata-mata hanya kepentingan sebelah pihak yang duduk dan merasa mereka punya suara mayoritas di parlemen sedangkan di dalam islam suatu sistem yang hidup dari Allah yang konsisten dengan penegakan hukum Allah mengenai Impeachment yang di Implementasikan dalam bentuk wahyu Allah yaitu Al-qur-an dan Hadist bukan seperti hukum yang berlaku di Indonesia yang di rancang karena gejolak politik dan pemikiran manusia. Namun terlepas dari hal dia atas di dalam Islam Impeachment itu terjadi karna ketidak puasan masyarakat terhadap Imamnya seperti yang

terjadi di masa khalifah yang di jadikan sebagai emberio  
pembahasan kajian pemakzulan dalam Islam



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka pada bab trakhir ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Impeachment Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia

*Impeachment* atau pemakzulan dapat dipahami sebagai turunanya, berhenti atau di pecat dari jabatannya. *Impeachment* berlaku pada sistem pemerintahan itu presidensial maupun parlementer. Karena secara historis praktik, impeachment itu untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang amat “powerfull” yang berkaitan dengan kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan bias.

Dasar Hukum impeachment kepala Daerah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 78 dan 79 .

Mekanisme Impeachment Kepala Daerah di Indonesia Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 79, pasal 80, pasal, 81 dan pasal 83

2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Impeachment Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia

Menurut fiqh siyasah. Pemakzulan di dalam Islam dapat di disinonimkan dengan *al-khalla'* yang berarti mencopot, mencabut, memecat, menelanjangi, menyingkirkan. Ibnu Majhur mengatakan pencopotan sama artinya dengan mencabutnya hanya saja di dalam istilah pemecatan terkandung makna penangguhan atau proses secara perlahan. Istilah *al-khalla'* ini erat kaitanya dengan pelanggaran. Jadi dapat di simpulkan bahwa *al-khalla'* dapat disinonimkan dengan pemecatan atau pemakzulan, namun dalam Ketatanegaraan Indonesia lebih di kenal dengan sebutan pemberhentian.

Pada masa Nabi gagasan pemakzulan atau pemberhentian Kepala Daerah jelas belum muncul dan belum dijelaskan secara rinci, cara pemberhentian Kepala Daerah tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi adapun dalam sejarah pemerintahan Rasulullah SAW dan Al-Khulafa Al-Rasyidin

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan Imam di Makzulkan menurut Ulama yaitu Kafir dan Murtad dalam Islam, Meninggalkan Shalat dan Menyeru untuk meninggalkan Shalat, Tidak memutuskan perkara dengan Hukum yang diturunkan Allah, Fasik, zalim dan berbuat bid'ah, Keterbatasan dalam bertindak dan Tidak cakap menurut Al-mawardi ada dua hal yang pertama keadilanya ternoda dan yang kedua tubuhnya cacat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam proses perkuliahan mata kuliah fiqh siyasah maupun mata kuliah lain lebih di tekan substansi materinya bukan hanya lepas kewajiban sebagai pengajar dan fasilitas untuk pembelajarannya juga ditingkatkan agar mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung mendapatkan ilmu pengetahuan berkualitas.
2. Kepada masyarakat umumnya harus mengetahui perkembangan jalanya hukum dan tata kenegaraan untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
3. Dalam proses impeachment diharapkan memiliki langkah yang jelas sertaproses yang lengkap sehingga mampu terhindar dari keinginan politikyang tidak bertanggung jawab.
4. Kepada anggota eksekutif dan legislatif supaya lebih berberan aktif dalam menyerap aspirasi dari masyarakat, dan mementikan kepentingan masyarakat umum bukan kepentingan kelompok atau pun partai tertentu supaya terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang taat terhadap hukum.



5. Untuk lembaga eksekutif dan legislatif lebih meningkatkan kinerjanya secara jujur dan amanah bukan buat sensai belakang di negeri republik ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achnad Warson Munnawir. *Kamus Al-Munawir versi Indonesia-Arab*, Surabaya Pustaka Progresif, 1997.
- Ad-Dumaiji Abdullah. *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Amir Munir Samsul. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta Amzah, 2009.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Balai pustaka, 2006.
- Andi Mustari Pide. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta : Radar Jaya Pratama , 1999.
- Aris Setiawan, Mekanisme Pemberhentian Bupati Aceng Fikri, *Viva News*, 22 Desember 2014.
- Baqi Abdul Fuad Muhammad. *Al-Ju'lu 'Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslimin*, Jakarta, Ulumul Qur'an , 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Syamil Al-Qur'an, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Edward Febriyanti Kusuma. MA Kabulkan Pemakzulan Bupati Katingan Karena Selingkuh". *Detik News*, 31 Maret 2017.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English*

*Jurisprudence, Ancient and Modern* . St. Paul, Minn.: West Group, 1991.

Ilham. Sanksi Pecat Menanti Dody, *Harian Lampung*, 3 maret 2018.

Imam Al-Mawardi. *Huku Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, penerjemah Abdul Hayyio Al-kartini, Kamaludin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Indrayana Denny, Negara Antara ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketata- egaraan, *Jakarta, Kompas*, 2008.

Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktri Politik Islam* (cet. I) Jakarta : Prenada media Group, 2016.

Iqbal Muhammad. *Fikih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (cet. II) Jakarta : Caya Media Pratama, 2007.

Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* . Jakarta: Prenada Media Group.

Ismail Yahya, *Hubungan Rakyat dan Penguasa Presfektif Sunnah*. Jakarta: Gema Insan press, 1995.

Jimly Asshidiqie. Kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam proses Impeachment Presiden, <http://www.theceli.com/pub/files/Impeachment/.do>.

Kamus Bahasa Indonesia Edisi Keempat . Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama , 2008.

Khairudin dan Muda Iskandar. *Pokok-pokok Hukum Acara Mahkamah Konsitusi*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012.

Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.

Moh Nadlir. Wali Kota Tegal Siti Masita ditangkap Kemendagri siapkan pengganti, Kompas, 29 Agustus 2017.

Munir Subarman. *hukum islam dan ketatanegaraan*, Cirebon: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.

Pulunagan J Syuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT . Raja Grapind Persada, 1995.

Ranny Kautur. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Taruna Grafika Bandung, 2000.

Ridwan. ini Salinan putusan MA terkait Pemakzulan Bupati Katingan Ahman yantenglie, *Pojok Satu*, 1 April 2017.

Sandro Gatra. **Mendagri: Bupati Garut Langgar UU, Kompas, 03 desember 2012.**

Sapuan. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam proses Impeachment Presiden*, Purwokerto STAIN press, 2009.

Sorjono soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Rajawali Press, Jakarta, 1985.

Sukardja Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Adtmistrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasa.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sutrisno Hadi. *Metedologi Riserc*, Yogyakarta: Andy offset, 1997.

Syarif ibn Mujar dan Zada Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Taufik Qurahman. DPRD Banten di mintak Lengserkan Ratu Atut dari Gubernur, Liputan 6, 24 Desember 2013.

Yatim Badr. *Sejarah Peradaban Islam (Cetakan ke-24)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Zoelva Hamdan. *Impeachment Presiden alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945 (cet. II)*. Konstitusi Press, Jakarta, 2014.

## **UNDANG-UNDANG**

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 59 ayat (2)

Amademen Undang-Undang Pemda (UU RI No.9 tahun 2015). Jakarta:Sinar Grafika,2016.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**RADEN INTAN**  
LAMPUNG